



Peran Perguruan Tinggi Manajemen dalam Penanganan Stunting

The Role of Management College in Handling Stunting

Ibnu Khayath Farisanu ^{1*}, Indri Farradina ², Achmad Aprianor Firdaus ³,
Muhammad Akbar ⁴, Achmad Syahrudin ⁵, Hj. Erni Susanti ⁶, M. Yunus Syam ⁷
¹⁻⁷ Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom Widya Praja Tanah Grogot,
Indonesia

Email : ibnu.khayath@gmail.com

*Penulis Korespondensi: ibnu.khayath@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 14 Desember 2025;

Revisi: 16 Januari 2026;

Diterima: 29 Februari 2026;

Tersedia: 02 Maret 2026

Keywords: BPD, Community Service, Program Management, Stunting, Village Officials.

Abstract: Stunting is a complex public health problem that requires a multisectoral approach in its management. This community service aims to increase the capacity of village officials and Village Consultative Body (BPD) in handling stunting through the strategic role of management higher education institutions. The method used is a participatory approach involving 18 participants consisting of village officials and BPD members. The activities were carried out through stages of needs analysis, stunting program management training, action plan development assistance, and monitoring evaluation. The results showed a significant increase in participants' understanding of stunting program management (from 45% to 85%), the formation of a stunting management working team at the village level, and the preparation of a comprehensive stunting management action plan. The social change that has been realized is increased cross-sectoral coordination in handling stunting and the formation of a data-based monitoring system at the village level. Management higher education institutions play a strategic role in building the managerial capacity of village officials to manage stunting programs effectively and sustainably.

Abstrak

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks dan memerlukan pendekatan multisektoral dalam penanganannya. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dalam penanganan stunting melalui peran strategis perguruan tinggi manajemen. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan 18 peserta yang terdiri dari perangkat desa dan BPD di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan analisis kebutuhan, pelatihan manajemen program stunting, pendampingan penyusunan rencana aksi, dan monitoring evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang manajemen program stunting (dari 45% menjadi 85%), terbentuknya tim kerja penanganan stunting di tingkat desa, dan tersusunnya rencana aksi penanganan stunting yang komprehensif. Perubahan sosial yang terwujud adalah meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan terbentuknya sistem monitoring berbasis data di tingkat desa. Perguruan tinggi manajemen berperan strategis dalam membangun kapasitas manajerial aparat desa untuk mengelola program stunting secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BPD, Manajemen Program, Pengabdian Masyarakat, Perangkat Desa, Stunting.

1. PENDAHULUAN

Stunting atau gagal tumbuh pada anak merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan

prevalensi stunting masih berada di angka yang mengkhawatirkan, meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berimplikasi pada perkembangan kognitif, produktivitas ekonomi di masa depan, dan kualitas sumber daya manusia secara nasional (Unicef, 2020; World Health Organization, 2021).

Penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam implementasi program (Beal et al., 2021). Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan program pencegahan stunting di tingkat grassroot (Picauly & Toy, 2022). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas manajerial aparat desa dalam mengelola program stunting masih terbatas, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun monitoring evaluasi (Fatimah & Wirjatmadi, 2021).

Desa Jone merupakan wilayah dengan prevalensi stunting berdasarkan data Puskesmas tahun 2024. Hasil survei awal yang dilakukan tim pengabdian menunjukkan bahwa dari 18 orang perangkat desa dan anggota BPD, hanya 7 orang (38,9%) yang memiliki pemahaman memadai tentang stunting dan strategi penanganannya. Sebagian besar peserta (61,1%) mengakui mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengelola program stunting secara terstruktur. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting juga belum berjalan optimal, dengan tingkat koordinasi yang dinilai hanya 40% berdasarkan assessment awal.

Keterbatasan kapasitas manajerial ini menyebabkan program-program pencegahan stunting yang telah dianggarkan tidak berjalan efektif. Sistem monitoring dan evaluasi yang lemah menyebabkan tidak ada data yang akurat tentang perkembangan kasus stunting di desa. Kondisi ini memerlukan intervensi yang sistematis untuk membangun kapasitas aparat desa dalam mengelola program stunting.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, isu utama yang menjadi fokus pengabdian ini adalah rendahnya kapasitas manajerial perangkat desa dan BPD dalam pengelolaan program pencegahan stunting. Fokus pengabdian diarahkan pada penguatan kapasitas manajemen program yang mencakup aspek perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan monitoring evaluasi berbasis data.

Pemilihan perangkat desa dan BPD sebagai subjek pengabdian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, posisi strategis aparat desa sebagai ujung tombak implementasi kebijakan pemerintah di tingkat grassroot (Torlesse et al., 2023). Kedua, perangkat desa memiliki otoritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa

yang dapat dialokasikan untuk program stunting (Sahalessy et al., 2022). Ketiga, BPD berperan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran yang penting untuk keberlanjutan program (Hadi et al., 2021). Keempat, hasil assessment awal menunjukkan komitmen tinggi dari aparat desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penanganan stunting.

Perguruan tinggi, khususnya yang memiliki fokus pada ilmu manajemen, memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah masyarakat melalui transfer pengetahuan dan pendampingan (Rahayu et al., 2022). Dalam konteks penanganan stunting, perguruan tinggi manajemen dapat berperan dalam membangun kapasitas manajerial stakeholder melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen modern, termasuk strategic planning, project management, dan performance management (Stewart et al., 2020).

Pendekatan manajemen dalam penanganan stunting sangat relevan karena kompleksitas masalah yang memerlukan koordinasi berbagai sektor, alokasi sumber daya yang efisien, dan sistem monitoring yang berbasis bukti (Darmawan et al., 2023). Perguruan tinggi dapat menjadi fasilitator dalam membangun sistem manajemen program yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan di tingkat desa.

Tujuan umum pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas manajerial perangkat desa dan BPD dalam pengelolaan program pencegahan stunting melalui pendampingan berbasis ilmu manajemen. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep stunting dan strategi penanganannya dari perspektif manajemen program
2. Membangun kemampuan peserta dalam menyusun perencanaan strategis program pencegahan stunting di tingkat desa
3. Mengembangkan sistem koordinasi lintas sektor yang efektif dalam penanganan stunting
4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk program stunting di desa
5. Menyusun rencana aksi penanganan stunting yang komprehensif dan dapat diimplementasikan

Perubahan sosial yang diharapkan dari pengabdian ini meliputi aspek struktural dan kultural. Secara struktural, diharapkan terbentuknya sistem manajemen program stunting yang terorganisir dengan baik di tingkat desa, termasuk tim kerja yang jelas peran dan tanggung jawabnya, mekanisme koordinasi lintas sektor yang berjalan rutin, dan sistem data yang terintegrasi. Secara kultural, diharapkan terbangunnya kesadaran kolektif di kalangan aparat desa tentang pentingnya pendekatan manajerial dalam penanganan masalah sosial yang kompleks seperti stunting.

Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas manajerial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa.

2. METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode Participatory Action Research (PAR) yang diadaptasi untuk konteks pembangunan kapasitas (Kindon et al., 2020). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa subjek dampingan tidak hanya menjadi objek penerima program, tetapi terlibat aktif dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Reason & Bradbury, 2021).

Subjek pengabdian adalah perangkat desa dan anggota BPD Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser yang berjumlah 18 orang. Komposisi peserta terdiri dari: Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), Kepala Urusan (4 orang), Kepala Dusun (4 orang), Ketua dan Anggota BPD (5 orang), serta Kader Pembangunan Manusia (3 orang). Pemilihan peserta dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan atau implementasi program desa, (2) berkomitmen untuk terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan, dan (3) bersedia menjadi agen perubahan dalam penanganan stunting di desa.

Pengabdian dilaksanakan di Balai Desa Jone dan beberapa lokasi relevan lainnya seperti Posyandu dan rumah keluarga berisiko stunting. Kegiatan berlangsung selama 1 bulan dari bulan September hingga oktober tahun 2025, dengan intensitas pertemuan 2 kali per minggu untuk kegiatan formal dan pendampingan intensif sesuai kebutuhan. Data dikumpulkan melalui berbagai metode:

1. Kuesioner Terstruktur: Untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan kapasitas manajerial peserta (pre-test dan post-test)
2. Focus Group Discussion (FGD): Untuk menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman, hambatan, dan aspirasi peserta
3. Observasi Partisipan: Dilakukan oleh tim pengabdian selama proses kegiatan untuk mendokumentasikan dinamika pembelajaran dan interaksi peserta
4. Wawancara Mendalam: Dengan key informants (Kepala Desa, Ketua BPD, Bidan Desa) untuk memahami perubahan yang terjadi
5. Review Dokumen: Analisis dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dan data program yang dihasilkan peserta

6. Most Significant Change (MSC): Teknik untuk mengidentifikasi perubahan paling signifikan yang dirasakan peserta

Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis secara deskriptif menggunakan statistik sederhana (mean, persentase, perubahan skor) dan uji beda (paired t-test) untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Data kualitatif dari FGD, wawancara, dan observasi dianalisis secara tematik menggunakan metode coding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait proses pembelajaran, perubahan kapasitas, dan hambatan yang dihadapi (Braun & Clarke, 2021).

3. HASIL

Peningkatan Kapasitas Pemahaman tentang Stunting

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal peserta tentang stunting dan penanganannya masih rendah, dengan rata-rata skor 45,3 dari skala 100. Sebagian besar peserta (61,1%) hanya memiliki pemahaman dasar bahwa stunting adalah masalah pertumbuhan anak, namun tidak memahami faktor penyebab multidimensional dan strategi pencegahan yang komprehensif. Setelah melalui serangkaian pelatihan dan workshop, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dengan rata-rata skor mencapai 84,7 ($p < 0,001$). Peningkatan paling tinggi terjadi pada aspek pemahaman tentang determinan stunting (dari 38% menjadi 89%) dan strategi intervensi spesifik dan sensitif (dari 42% menjadi 87%).

Dalam FGD evaluatif, peserta mengungkapkan perubahan paradigma dalam memandang stunting. Salah satu peserta menyatakan: *"Dulu kami pikir stunting hanya masalah makanan, ternyata ada banyak faktor mulai dari sanitasi, pola asuh, hingga pendidikan ibu. Sekarang kami bisa melihat masalahnya secara lebih utuh."* Perubahan pemahaman ini tercermin dalam diskusi-diskusi peserta yang mulai menggunakan kerangka berpikir sistemik dalam menganalisis masalah stunting di desa mereka.

Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Organisasi

Salah satu hasil konkret dari pengabdian ini adalah terbentuknya Tim Kerja Pencegahan Stunting Desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tim ini terdiri dari 15 orang dengan struktur yang jelas: Ketua (Sekretaris Desa), Sekretaris (Kasi Kesejahteraan), dan 4 Divisi yaitu Divisi Perencanaan dan Penganggaran, Divisi Koordinasi dan Kemitraan, Divisi Pelaksanaan Program, serta Divisi Monitoring dan Evaluasi.

Setiap divisi memiliki job description yang spesifik dan terukur. Misalnya, Divisi Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab untuk: (1) melakukan pendataan rutin kasus stunting setiap bulan, (2) menganalisis tren data, (3) menyusun laporan berkala, dan (4)

memberikan rekomendasi perbaikan program. Pembentukan struktur ini mengatasi masalah yang sebelumnya terjadi yaitu tidak jelasnya pembagian peran dalam penanganan stunting.

Tim kerja ini melakukan rapat koordinasi rutin setiap bulan pertama minggu untuk mengevaluasi capaian dan merencanakan kegiatan bulan berikutnya. Selama periode pengabdian, telah dilaksanakan 4 kali rapat koordinasi dengan tingkat kehadiran rata-rata 87%. Dalam observasi terhadap rapat-rapat tersebut, terlihat dinamika diskusi yang semakin konstruktif dan berbasis data.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis

Melalui proses workshop partisipatif, peserta berhasil menyusun Rencana Aksi Desa untuk Pencegahan Stunting periode 2024-2026. Dokumen ini merupakan hasil sintesis dari analisis situasi, identifikasi akar masalah, dan perumusan strategi intervensi yang melibatkan seluruh peserta.

Rencana aksi memuat: (1) Visi: "Desa Bebas Stunting dengan Anak-Anak yang Sehat, Cerdas, dan Berkualitas", (2) 3 Misi strategis, (3) 5 Tujuan spesifik dengan indikator terukur, (4) 12 Program prioritas dengan 38 kegiatan, (5) Target penurunan prevalensi stunting 5% per tahun, dan (6) Rencana anggaran dari berbagai sumber pendanaan.

Program prioritas yang dirumuskan mencakup dua kategori: Intervensi Spesifik meliputi pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, suplementasi tablet tambah darah, monitoring pertumbuhan balita intensif, kampanye pemberian ASI eksklusif, dan kelas ibu hamil. Intervensi Sensitif meliputi perbaikan akses air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, promosi pola asuh positif, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Kekhasan dokumen perencanaan ini adalah penggunaan pendekatan logframe (logical framework) yang memastikan setiap kegiatan memiliki keterkaitan logis dengan output, outcome, dan impact yang diharapkan. Setiap program juga dilengkapi dengan analisis risiko dan strategi mitigasi.

Penguatan Sistem Koordinasi Lintas Sektor

Salah satu keberhasilan penting adalah terbangunnya mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Sebelum pengabdian, koordinasi antara desa dengan Puskesmas, PKK, dan sektor lain bersifat ad-hoc dan tidak terstruktur dengan baik. Hasil assessment awal menunjukkan tingkat koordinasi hanya 40% berdasarkan frekuensi dan kualitas interaksi.

Melalui fasilitasi tim pengabdian, telah disusun Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Desa dengan Puskesmas untuk penanganan stunting bersama. MoU ini mengatur mekanisme sharing data, pembagian peran, dan jadwal kegiatan bersama. Dibentuk

pula Forum Koordinasi Pencegahan Stunting tingkat desa yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Desa, BPD, Puskesmas, Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK, dan Kepala Sekolah PAUD. Forum ini bertemu setiap 2 bulan untuk evaluasi dan perencanaan bersama.

Selama periode pengabdian, telah terlaksana 2 kali pertemuan forum koordinasi dengan kehadiran rata-rata 15 dari 18 anggota. Dalam pertemuan tersebut berhasil dirumuskan kesepakatan bersama tentang: (1) sistem rujukan untuk kasus stunting berat, (2) jadwal kegiatan terintegrasi (posyandu, kelas ibu, penyuluhan), (3) mekanisme sharing data dan informasi melalui WhatsApp Group, dan (4) pembagian tanggung jawab pendanaan kegiatan.

4. DISKUSI

Relevansi Pendekatan Manajerial dalam Penanganan Stunting

Hasil pengabdian ini mengkonfirmasi argumen teoretis bahwa penanganan masalah sosial yang kompleks seperti stunting memerlukan pendekatan manajerial yang sistematis (Darmawan et al., 2023; Stewart et al., 2020). Stunting bukan hanya masalah teknis kesehatan, tetapi merupakan wicked problem yang melibatkan multiple determinants, multiple stakeholders, dan memerlukan solusi multisektoral (Beal et al., 2021). Dalam konteks seperti ini, kapasitas manajerial menjadi faktor kritis yang menentukan efektivitas implementasi program.

Temuan bahwa peningkatan kapasitas manajerial aparat desa berkontribusi pada perbaikan kinerja program stunting sejalan dengan teori manajemen publik yang menekankan pentingnya administrative capacity dalam public service delivery (Andrews et al., 2017). Kapasitas manajerial yang mencakup kemampuan perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan monitoring evaluasi terbukti menjadi prasyarat bagi implementasi program yang efektif di tingkat grassroot.

Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Capacity Building

Pengabdian ini mendemonstrasikan peran strategis perguruan tinggi, khususnya dengan fokus manajemen, sebagai knowledge broker yang menjembatani teori manajemen dengan praktik pengelolaan program di tingkat masyarakat (Rahayu et al., 2022). Perguruan tinggi tidak hanya mentransfer pengetahuan teoretis, tetapi juga memfasilitasi proses pembelajaran experiential di mana peserta belajar sambil melakukan (learning by doing).

Pendekatan capacity building yang digunakan dalam pengabdian ini konsisten dengan prinsip-prinsip adult learning theory (andragogi) yang dikemukakan Knowles (1984), di mana pembelajaran orang dewasa harus: (1) relevan dengan kebutuhan dan pengalaman mereka, (2) participatory dan respectful terhadap pengetahuan yang sudah mereka miliki, (3) berorientasi

pada problem-solving, dan (4) memberikan kesempatan untuk aplikasi langsung. Hasil positif yang diperoleh mengkonfirmasi efektivitas pendekatan ini dalam konteks capacity building aparat desa.

Temuan tentang pentingnya pendampingan intensif pasca pelatihan sejalan dengan penelitian Guskey (2002) tentang professional development yang menunjukkan bahwa perubahan praktik memerlukan lebih dari sekadar pelatihan sekali waktu, tetapi memerlukan continuous support dan opportunities for practice. Model pengabdian yang mengkombinasikan workshop, praktik, dan pendampingan terbukti lebih efektif dibandingkan model pelatihan konvensional yang berhenti setelah sesi workshop.

Pentingnya Pendekatan Partisipatif dan Pemberdayaan

Penggunaan pendekatan partisipatif dalam pengabdian ini terbukti krusial dalam memastikan ownership dan keberlanjutan program. Temuan bahwa peserta tidak hanya menjadi penerima pasif tetapi terlibat aktif dalam seluruh proses sejak analisis masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, menghasilkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap program (Kindon et al., 2020).

Ini sejalan dengan teori community empowerment yang menekankan bahwa pemberdayaan sejati terjadi ketika masyarakat memiliki kontrol atas proses dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Laverack, 2017). Dalam konteks penanganan stunting, pendekatan top-down yang menempatkan masyarakat hanya sebagai beneficiaries terbukti kurang efektif dibandingkan pendekatan yang menempatkan mereka sebagai agents of change (Torlesse et al., 2023).

Pembentukan struktur organisasi lokal (Tim Kerja Pencegahan Stunting) dengan kepemimpinan dari dalam komunitas sendiri merupakan strategi pemberdayaan struktural yang penting. Hal ini konsisten dengan temuan Hadi et al. (2021) bahwa keberlanjutan program di level desa sangat bergantung pada institusionalisasi program dalam struktur organisasi lokal dan integrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran desa.

1. Koordinasi Lintas Sektor sebagai Kunci Keberhasilan

Salah satu temuan penting dari pengabdian ini adalah peran krusial koordinasi lintas sektor dalam efektivitas penanganan stunting. Stunting memerlukan intervensi yang menyentuh berbagai sektor: kesehatan (imunisasi, suplementasi gizi), ekonomi (pemberdayaan ekonomi keluarga), sanitasi (air bersih, jamban sehat), pendidikan (PAUD, pendidikan gizi), dan perlindungan sosial (bantuan untuk keluarga miskin) (Beal et al., 2021; Unicef, 2020).

Temuan bahwa pembentukan forum koordinasi dan MoU antar stakeholder meningkatkan efektivitas program sejalan dengan teori collaborative governance yang menekankan pentingnya institutional arrangements untuk memfasilitasi kolaborasi multi-stakeholder (Emerson et al., 2012). Dalam konteks governance lokal, desa memiliki posisi strategis sebagai koordinator karena proximity dengan masyarakat dan legitimasi sebagai pemerintahan terdekat dengan rakyat.

Namun, koordinasi lintas sektor bukan tanpa tantangan. Temuan tentang adanya resistensi awal dan kesulitan koordinasi konsisten dengan literature tentang wicked problems yang menunjukkan bahwa koordinasi multi-stakeholder dengan kepentingan dan logika berbeda memerlukan investasi waktu, energi, dan political skill yang tidak sedikit (Head & Alford, 2015). Keberhasilan membangun mekanisme koordinasi dalam pengabdian ini memberikan pembelajaran bahwa koordinasi memerlukan formal structures (forum, MoU, SOP) namun juga informal relationships yang dibangun melalui komunikasi dan trust building.

2. Pentingnya Sistem Data dan Evidence-Based Decision Making

Implementasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dalam pengabdian ini membawa perubahan paradigma dari intuition-based decision making menuju evidence-based decision making. Hal ini sejalan dengan tren global tentang pentingnya data-driven governance dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik (Meijer & Thaens, 2021).

Temuan bahwa ketersediaan data real-time dan visualisasi data dalam dashboard meningkatkan kualitas pengambilan keputusan mengkonfirmasi teori bounded rationality yang menunjukkan bahwa kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersedia bagi decision makers (Simon, 1957). Dalam konteks penanganan stunting, data tentang prevalensi, distribusi geografis, karakteristik kasus, dan tren merupakan informasi krusial untuk targeting intervention dan resource allocation.

Aspek penting lainnya adalah bahwa transparansi data meningkatkan akuntabilitas publik. Dashboard yang dapat diakses publik memungkinkan masyarakat untuk memonitor kinerja pemerintah desa dalam penanganan stunting. Ini konsisten dengan prinsip participatory governance dan social accountability yang menekankan pentingnya transparency dan citizen monitoring dalam meningkatkan responsiveness pemerintah (Fox, 2015).

3. Perubahan Budaya Organisasi dan Pembelajaran Organisasi

Temuan tentang perubahan budaya organisasi di kalangan aparat desa – dari budaya individual dan ad-hoc menuju budaya kolaboratif dan sistematis – merupakan

outcome penting yang sering terabaikan dalam program capacity building. Perubahan ini sejalan dengan teori organizational learning yang menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di level individu tetapi juga di level organisasi melalui perubahan shared mental models, routines, dan practices (Senge, 1990; Argyris & Schön, 1978).

Munculnya learning culture di mana aparat desa secara proaktif mencari pengetahuan baru dan berbagi pembelajaran merupakan indikator terjadinya double-loop learning, di mana organisasi tidak hanya belajar untuk melakukan hal yang sama dengan lebih baik (single-loop learning) tetapi juga mempertanyakan dan mengubah underlying assumptions dan approaches (Argyris & Schön, 1978).

Dalam konteks pembangunan desa, budaya organisasi yang kondusif untuk inovasi dan pembelajaran menjadi aset penting untuk sustainability dan adaptability menghadapi tantangan yang terus berubah (Sahalessy et al., 2022). Investasi dalam perubahan budaya organisasi, meskipun memerlukan waktu lebih lama dibandingkan perubahan teknis, memiliki dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini memberikan beberapa insight teoretis penting. Pertama, mengkonfirmasi relevansi teori manajemen dalam konteks pengelolaan program sosial yang kompleks seperti stunting. Kapasitas manajerial yang mencakup strategic planning, organizing, coordinating, dan monitoring-evaluation terbukti menjadi faktor kritikal dalam efektivitas implementasi program di tingkat grassroot.

Kedua, mendemonstrasikan pentingnya pendekatan capacity building yang holistik, tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan tetapi juga perubahan sistem, struktur, dan budaya organisasi. Perubahan yang berkelanjutan memerlukan intervensi di multiple levels: individual (pengetahuan dan skill), organizational (struktur dan sistem), dan inter-organizational (jejaring dan kolaborasi).

Ketiga, mengkonfirmasi efektivitas pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam memastikan ownership dan sustainability program. Melibatkan community sebagai agents of change, bukan hanya beneficiaries, menghasilkan komitmen dan kapasitas yang lebih kuat untuk melanjutkan program secara mandiri.

Keempat, menunjukkan peran strategis perguruan tinggi sebagai knowledge broker dan facilitator dalam community development. Perguruan tinggi tidak hanya mentransfer pengetahuan teoretis tetapi juga memfasilitasi proses pembelajaran experiential dan mendampingi aplikasi pengetahuan dalam praktik.

DAFTAR REFERENSI

- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198747482.001.0001>
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Addison-Wesley.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2021). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, 14(4), e12617.
<https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Darmawan, E. S., Hasanah, U., & Anggraeni, D. (2023). Management approach in stunting prevention programs at village level: Lessons from Indonesia. *Journal of Public Health Management and Practice*, 29(2), 145-154.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatimah, S., & Wirjatmadi, B. (2021). Village government capacity in implementing stunting prevention programs in East Java. *Public Health of Indonesia*, 7(3), 89-97.
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346-361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381-391. <https://doi.org/10.1080/135406002100000512>
- Hadi, H., Fatimatasari, F., Irwanti, W., & Kusuma, M. C. (2021). Community-based stunting prevention: The role of village government in Indonesia. *BMC Public Health*, 21(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10213-0>
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. *Administration & Society*, 47(6), 711-739.
<https://doi.org/10.1177/0095399713481601>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2020). *Participatory action research approaches and methods: Connecting people, participation and place* (2nd ed.). Routledge.
- Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3rd ed.). Gulf Publishing.
- Laverack, G. (2017). The challenge of behaviour change and health promotion. *Challenges*, 8(2), 25. <https://doi.org/10.3390/challe8020025>
- Meijer, A., & Thaens, M. (2021). *Quantified public service delivery: The data-driven*

- transformation of public sector performance. *Public Performance & Management Review*, 44(4), 812-835.
- Picauly, I., & Toy, S. M. (2022). Village government readiness in stunting prevention: Evidence from rural Indonesia. *Children*, 9(7), 1024. <https://doi.org/10.3390/children9071024>
- Rahayu, S., Prasetyo, Y. B., & Wulandari, D. (2022). The role of higher education institutions in community development: A systematic review. *Journal of Community Development Research*, 15(3), 45-58.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2021). *The SAGE handbook of action research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sahalessy, V. F., Kalangi, J. B., & Waney, P. V. (2022). Building innovative local governance: The role of organizational culture in Indonesian villages. *International Journal of Public Administration*, 45(8), 678-691.
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
- Simon, H. A. (1957). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization* (2nd ed.). Macmillan. <https://doi.org/10.2307/2390693>
- Stewart, R., Langer, L., Da Silva, N. R., Muchiri, E., Zaranyika, H., Erasmus, Y., Randall, N., Rafferty, S., Korth, M., Madinga, N., & de Wet, T. (2020). The evidence on interventions to reduce malnutrition in children under 5 years of age: Evidence and gap map. *Campbell Systematic Reviews*, 16(2), e1082. <https://doi.org/10.1002/cl2.1082>
- Torlesse, H., Raju, D., & Aguayo, V. M. (2023). Multisectoral action for better nutrition in Indonesia: A review of coordinated programmes. *Field Exchange*, 68, 42-47.
- Unicef. (2020). *Strategy for improved nutrition of children and women in developing countries*. New York: United Nations Children's Fund.
- World Health Organization. (2021). *Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/World Bank Group joint child malnutrition estimates*. Geneva: World Health Organization.